

**PERANAN PKS DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KALIMANTAN BARAT 2018**

(Diterima 27 Agustus 2019 ; direvisi 01 September 2019 ; disetujui 30 November 2019)

Hadi Rianto¹
Rohani²

^{1,2} Program Studi PPKN, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI
Pontianak

Abstrak

Pendidikan politik sangat diperlukan untuk seluruh warga negara yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang politik, selain itu juga pendidikan politik diperuntukkan bagi setiap warga negara yang sudah memiliki pengetahuan politik hal ini penting dilakukan mengingat masih banyaknya tingkat apatis masyarakat dalam kegiatan politik. Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap proses pendidikan politik yang dilakukan partai berbasis keagamaan pada kader dan masyarakat umum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan interview, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Dari hasil analisis data yang diperoleh maka hasil penelitian ini menemukan bahwa “Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam menyongsong pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2018 dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti seminar-seminar, pengajian rutin tiap pekan untuk kader, dan kajian-kajian umum untuk masyarakat pada umumnya (pemilih), dan Pendidikan politik dilakukan melalui media sosial, media pribadi, media cetak maupun elektronik.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Political education is very necessary for all citizens who lack or do not yet have an understanding of politics, besides that political education is intended for every citizen who already has political knowledge. This is important because there are still many levels of public apathy in political activities. This research was carried out to provide an understanding of the process of political education conducted by religious-based parties in cadres and the general public. The research method used is a qualitative approach with interviews, observation and documentation as data collection techniques. From the results of data analysis obtained, the results of this study found that "Political education carried out by the Prosperous Justice Party in welcoming the 2018 election to West Kalimantan Region was carried out with various activities such as seminars, weekly recitation for cadres, and general studies for the general public (voters), and political education is carried out through social media, personal media, print and electronic media.

Keywords: Political Education, Election of Regional Heads

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi itu sendiri yang secara umum diartikan sebagai pemerintahan yang bersumber dari rakyat. Dipertegas oleh Sitepu E (2016: 1) yang menyatakan bahwa sejarah dari perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat dimaknai bahwa partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Sejak kemerdekaan kehidupan partai politik ditandai dengan bermunculannya banyak partai (multi partai). Dengan banyaknya partai diharapkan banyak juga wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Selanjutnya Sitepu, E (2016: 1) menegaskan sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 pasal 1 angka 1 tentang Partai Politik menyiratkan bahwa “Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar

persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum”. Hal ini menegaskan bahwa partai politik didirikan oleh sekelompok orang untuk memperjuangkan kepentingan bersama yang dilakukan melalui pemilihan umum. Diharapkan dalam memperjuangkan kepentingan bersama partai politik melakukannya dengan hal-hal yang positif dan baik. Partai politik sangat memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi politik.

Satu diantara fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Dengan adanya pendidikan politik diharapkan dapat mewujudkan masyarakat melek politik, dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik sangat diperlukan untuk warga negara yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang politik, selain itu juga pendidikan politik diperuntukkan bagi warga negara yang sudah memiliki pengetahuan politik hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya tingkat apatis masyarakat dalam kegiatan politik.

Edgar Fore dkk (1978) (Prihatmoko, 2003: 74) mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-

pilarnya, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakter manusia non formal oleh partai politik, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurut peneliti pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan adanya partai politik yang peduli untuk melakukan pendidikan politik kepada warga negara atau masyarakat akan menumbuhkan politik yang ideal yaitu adanya kesadaran masyarakat untuk mendukung sistem politik serta memberikan kritik dan mengontrol pemerintahan yang ada di Indonesia.

Alasan peneliti memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai obyek penelitian yaitu PKS merupakan partai yang besar dan solid dan mampu membuat citra baik tentang partainya yang berbeda dari partai-partai Islam lainnya. Selain itu PKS merupakan partai yang memenangkan pemilu di beberapa daerah seperti di Sambas, Jawa Barat, Sumatra Barat, Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti lewat media online dimana Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Ahmad Rabiul Muzammil mengatakan, angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kalbar tahun 2012

yang digelar 20 September lalu mencapai 70,70 persen. Sebanyak 2.380.230 pemilih dari 3.377.997 pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara yang digelar Kamis (20/9) lalu. "Sebanyak 2.380.230 pemilih itu terdiri atas 1.186.127 pemilih laki-laki dan 1.194.103 pemilih perempuan. (Liputan 6 New, 2012). Hal ini dapat dimaknai masih tingginya angka golput masyarakat. Adapun penyebabnya angka partisipasi pemilih terkait kesadaran masyarakat setempat dan tuntutan hidup. Oleh karena itu diperlukan peran yang aktif dari KPU maupun partai dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peranan Partai Keadilan Sejahtera dalam Memberikan Pendidikan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2018. Dari penelusuran peneliti terhadap penelitian yang relevan, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik tentang peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sitepu, E (2016: 7) menyatakan bahwa Pendidikan politik diarahkan sebagai pendidikan kebangsaan, yaitu pendidikan yang mampu

membangkitkan semangat kebangsaan, memperkuat kesadaran ideologis, dan membentuk perilaku warga bangsa sesuai dengan ideologi bangsa. Partai politik hendaknya mempersiapkan dan menyediakan sekolah kebangsaan, maksudnya adalah mempersiapkan model pendidikan yang lebih sistematis dan diharapkan mampu mendialogkan antara tradisi keilmuan dan tradisi kepartaian, atau bekerja sama dengan dunia pendidikan, sehingga partai politik mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat dan bangsa.

Selanjutnya penelitian Rosana, E (2012: 149) menekankan bahwa partai politik diharapkan dapat memberikan perubahan yang berarti bagi negara yaitu perubahan yang bersifat positif. Dengan adanya partai politik, maka negara yang demokratis yang selama ini diharapkan dapat terwujud. Penelitian lain juga mengangkan topik tentang sosialisasi politik Djuyadi, Y (2014: 1210) menegaskan bahwa proses sosialisasi politik Pemilu legislatif oleh KPU yang dilakukan dengan cara mendatangi beberapa kampus, sekolah, maupun kelompok masyarakat tertentu dinilai efektif sebab mampu menekan angka golput disaat muncul kekhawatiran akan semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang menimpa kader partai.

Selanjutnya Wanma, Victor A (2018) Pertama, Pelaksanaan Pendidikan politik yang dilakukan agen pendidikan politik di Distrik Samofa belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terindikasi pada hasil penelitian yang menunjukkan belum maksimalnya peranan agen pendidikan politik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pelaksanaan partisipasi politik generasi muda. Kedua, Pendidikan Politik yang dilaksanakan melalui agen pendidikan politik belum memberikan dampak/pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik generasi muda. Hal tersebut terindikasi pada hasil penelitian yang menunjukkan Pendidikan Politik yang dilaksanakan agen pendidikan belum secara optimal mempengaruhi partisipasi politik generasi muda pada aktifitas politik. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Sugeng (2015: 12) tentang rekrutmen politik partai hati nurani rakyat (HANURA) pada pemilihan umum legislatif, hasil penelitian menegaskan bahwa sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai sistem rekrutmen yang diciptakan Partai Hanura yakni rekrutmen terbuka.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan secara sistematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Creswell (2010: 15) mendefinisikan

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif adalah kepedulian terhadap “makna”. Dalam hal ini penelitian naturalistik tidak peduli terhadap persamaan dari obyek penelitian melainkan sebaliknya mengungkap pandangan tentang kehidupan dari orang-orang yang berbeda. Pemikiran ini didasari pula oleh kenyataan bahwa makna yang ada dalam setiap orang (manusia) berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengungkap kenyataan yang ada dalam diri orang yang unik itu menggunakan alat lain kecuali manusia sebagai instrumen.

Pendekatan kualitatif dipandang sesuai dengan masalah penelitian ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang peranan Partai Keadilan Sejahtera dalam memberikan pendidikan politik untuk menyongsong pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2018 membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual.
2. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya.
3. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Penekanan kualitatif secara khusus memberikan keuntungan dalam penelitian ini dimana dapat memperoleh gambaran dan informasi berupa bagaimana proses, hasil, pandangan tentang pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai keadilan sejahtera. Selain itu, peneliti juga ingin mengungkapkan perilaku perorangan melalui pengetahuan, gagasan, dan pikirannya sebab penelitian kualitatif pada hakekatnya juga merupakan pengamatan kepada orang-orang tertentu dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bahasa

mereka serta menafsirkannya sesuai dengan dunianya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik yang menamakan dirinya sebagai partai da'wah, hal ini dapat dipahami bahwa partai ini secara serius untuk melakukan kegiatan syiar Islam di bidang da'wah pada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sekaligus memberikan perhatian yang sangat serius pada masalah pengkaderan. Adapun tujuan pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS yaitu untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya baik sasaran sifatnya ke dalam maupun ke luar. Sasaran ke dalam berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik dalam internal partai yaitu upaya meningkatkan kemampuan dan peran kader atau anggota partai melalui pembinaan (tarbiyah) sehingga dapat mewujudkan kader PKS yang bersih, peduli dan profesional. Sasaran ke luar berkaitan dengan pendidikan politik yaitu upaya meningkatkan pencerahan masyarakat tentang politik secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan lapangan mengenai pendidikan politik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dan

pembinaan, nadwah (semiar), tatsqif (kajian), sosialisasi dan kegiatan sosial yang dilaksanakan secara terus menerus. Hal ini diperoleh bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai secara terus menerus bukan musiman. Hal sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rusdiansyah, SH.I selaku Ketua DPD PKS, adapun petikan wawancaranya sebagai berikut: “pendidikan politik yang dilakukan PKS sifatnya terus menerus, tidak musiman. Kalau kita lihat bahwa partai lain itu mengadakan pendidikan politik atau sosialisasi politik jika ada pemilihan kepala daerah atau pileg”.

Selanjutnya pendapat lain juga dipaparkan oleh Ketua Kaderisasi DPD PKS Kota Pontianak yaitu Bapak Agus Ahmad Ridwan yang berpendapat bahwa dalam pendidikan politik ini dilakukan partai secara berkesinambungan tanpa ada musiman. Selanjutnya Bapak Agus berpendapat bahwa pendidikan politik adalah mengedukasi masyarakat terutama kader PKS tentang pentingnya politik sebagai bagian kontribusi untuk negara dan agama. Pendapat lain juga dikemukakan Bapak Cep Wiharja selaku Ketua Bidang Pembangunan Umat dan Dakwah DPD PKS Kota Pontianak yang menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan arahan-arahan, bimbingan dan penerangan yang dilakukan oleh seseorang

atau organisasi guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam berpolitik secara bersih, sehat dan jujur. Selanjutnya pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Pramono Tripambudi, SE selaku Ketua Bidang Kaderisasi DPW Kalbar yang menyatakan pendidikan politik itu sebagai upaya yang menanamkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi individu atau warga masyarakat terhadap kepentingan dan kebijakan politik. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari pendidikan politik yaitu ikut berpartisipasi dalam menentukan arah dan perwujudan kesejahteraan rakyat dan ikut berperan sukses kepemimpinan nasional atau daerah.

Agar pendidikan politik yang dilakukan bisa diketahui oleh masyarakat maka PKS melakukan pendidikan politik melalui media-media yang dekat dengan masyarakat. Hasil wawancara dengan Ketua Kaderisasi DPD PKS Kota Pontianak memaparkan bahwa ada beberapa media yang sering digunakan PKS dalam pendidikan politik dan sosialisasi politik seperti media sosial, poster-poster dan kajian langsung. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ketua DPD PKS Kota Pontianak yang menyatakan bahwa media yang sering digunakan dalam pendidikan politik dan sosialisasi politik yaitu semua

media baik cetak maupun elektronik, namun untuk saat ini media sosial lebih mudah dan cepat sedangkan untuk media cetak digunakan untuk event-event tertentu yang dilakukan oleh PKS. Pendapat selanjutnya juga dikemukakan oleh Ketua DPW PKS Wilayah Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa media yang sering digunakan untuk pendidikan politik oleh PKS yaitu media sosial seperti instagram, facebook tentang Partai Keadilan Sosial.

Partai Keadilan Sejahtera dalam menyampaikan pendidikan politik melalui berbagai cara seperti seminar-seminar, dor to dor, atau kajian-kajian. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Kaderisasi DPD PKS Kota Pontianak. Berikut petika hasil wawancaranya: “Metode yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dalam melaksanakan pendidikan politik melalui Dor to dor dan penyampaian melalui kajian-kajian agama dan juga seminar-seminar kepemimpinan dan pendidikan politik”.

Hal serupa juga dikatakan oleh Rusdiansyah (Ketua DPD PKS Kota Pontianak) bahwa metode yang digunakan dalam pendidikan politik melalui pengajian-pengajian rutin yang dilakukan PKS. Melakukan kajian bidang politik yang diundang masyarakat umum. Contoh kita membuat kajian umum masyarakat dengan

materi yang disampaikan tentang peradaban konsep politik Rasulullah, dan Islam masa lalu. Sejalan dengan itu Arif Joni Prasetyo (Ketua DPW Kalimantan Barat) juga mengatakan bahwa dalam mengenalkan pendidikan politik kepada kader maupun masyarakat melalui pengajian rutin yang telah diprogramkan sebelumnya.

Pendidikan Politik yang dilaksanakan Partai Keadilan Sejahtera dibagi menjadi 2 yaitu pendidikan politik untuk kader dan pendidikan politik untuk pemilih. Pendidikan politik untuk kader dilakukan dengan cara pengajian rutin, seminar-seminar, mabit, jalsah ruhiyah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ketua DPW PKS Kalimantan Barat yang mengatakan bahwa pendidikan politik kader PKS dengan mengikuti kajian/pengajian rutin setiap 1 kali dalam sepekan, mabit bagi yang ikhwan, JR, majelis qur'an, kuliah dhuha. Pendidikan politik untuk pemilih dengan diadakannya kajian tentang konsep politik Rasulullah. Hal ini sesuai dengan diungkapkan Ketua DPD, PDW PKS yang menyatakan bahwa kajian umum kami laksanakan untuk masyarakat umum dengan mengundang ustadz untuk menyampaikannya tujuan kami untuk memberikan pemahaman kepada pemilih tentang politik. Seperti materi pentingnya memilih pemimpin yang beragama Islam.

Untuk mendukung dan memperkuat hasil wawancara tersebut di atas, peneliti mendeskripsikan hasil observasi terhadap pendidikan politik yang dilaksanakan Partai Keadilan Sejahtera terungkap bahwa pelaksanaan pendidikan politik dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera meliputi berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, tatsqif (kajian), sosialisasi dan kegiatan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan Partai Keadilan Sejahtera dalam menyongsong pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat ini melalui berbagai kegiatan seperti seminar-seminar, pengajian rutin tiap pekan untuk kader, dan kajian-kajian umum untuk masyarakat pada umumnya (pemilih). Pendidikan politik juga dilakukan media sosial, media pribadi, media cetak maupun elektronik.

Partai politik didalam fungsinya bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Tetapi kegiatan pendidikan politik ini juga harus berlangsung secara terus-menerus dan kenyataannya,

partai politik justru memberikan contoh yang buruk. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elite dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Pendidikan Politik itu merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasi segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya Sebagai manusia atau warga negara.

Pendidikan politik sebagai aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, serta loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap Persoalan politik dan sikap politik (Sitepu, E: 2016). Disamping itu, pendidikan politik ini bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik

merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan : membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua metode: dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004: 55) pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Selanjutnya untuk tujuan pendidikan politik bagi generasi muda dituangkan dalam Inpres

No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004: 56) bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilaku-kan melalui:

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
- c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan politik mengacu pada dasar hukum konstitusi yaitu pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian seluruh materi pendidikan politik harus mengacu pada amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terkecuali pada pelaksanaan bagi pendidikan politik generasi muda. Di Indonesia materi serta kurikulum bagi proses pendidikan politik

generasi muda diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik meliputi; 1) Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara; 2) Kehidupan dan kerukunan hidup beragama; 3) Motivasi berprestasi; 4) Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia; 5) Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keikutsertaan dalam politik; 6) Disiplin pribadi, sosial, dan nasional; dan 7) Kepercayaan pada pemerintah.

Simpulan

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam menyongsong pemilihan Kepada Daerah Kalimantan Barat 2018 yaitu melalui berbagai kegiatan seperti seminar-seminar, pengajian rutin tiap pekan untuk kader, dan kajian-kajian umum untuk masyarakat pada umumnya (pemilih). Pendidikan politik juga dilakukan media sosial, media pribadi, media cetak maupun elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W., 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuyadi, Y. 2014. Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Humaniora* Vol. 5 No. 2.
- Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik
- Impres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
- Liputan 6 New. 2012. www.liputan6.com/news/read/440794/jumlah-pemilih-pilkada-kalbar-7070-persen.
- Prihatmoko, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21 Press.
- Rosana, E. 2012. Partai Politik dan Pembangunan Politik. *Jurnal TAPIS* Vol. 8 No. 1.
- Rusadi, K. 2004. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Algensindo.
- Sitepu, E. 2016. Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Berkarakter Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Research Sains* Vol 2 No. 1.
- Sugeng. 2015. Rekrutmen Politik Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Pada Pemilihan Umum Legislati di Kota Pekanbaru Tahun 2014. *JOM FISIP* Vol. 2 No. 2.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2004. *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*. UNY
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Wanna, V.A. Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. <https://media.neliti.com/media/publications/1123-ID-entingnya-pendidikan-politik-generasi-muda-terhadap-pelaksanaan-partisipasi-poli.pdf> (Akses 2018).